

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Hartati (2011) dengan judul “Evaluasi Permohonan SKB Pasal 4 ayat 2 atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di KPP Pratama Klaten” yang membahas tentang tata cara pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima wajib pajak, dan dampak yang mempengaruhi kinerja fiskus dengan diberlakukannya surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak dari tanah dan/atau bangunan. Metode penelitian yang dilakukan Harti adalah dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data yang relevan.

Penelitian yang dilakukan Trisnawati (2015) dengan judul “Keabsahan Surat Keterangan Bebas Pajak Sebagai Syarat Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan” yang membahas tentang surat keterangan bebas (SKB) sebagai syarat permohonan balik nama sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila surat keterangan bebas tidak dapat digunakan sebagai syarat permohonan balik nama sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ade (2014) dengan judul “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final atas Waris”, melakukan penelitian tentang hukum atas penerbitan surat

keterangan bebas (SKB) terhadap pajak penghasilan final atas waris yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang keterkaitan pajak penghasilan dalam pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan adalah objek pajak penghasilan (PPh) final dan dalam pasal 4 ayat 3 huruf (b) menyebutkan waris dikecualikan dalam objek pajak. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Adapun hubungan penelitian terdahulu adalah dengan mengembangkan evaluasi permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan final atas waris yang berpusat pada pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Utara pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) 1.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah penilaian, pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses menemukan nilai layanan informasi dari suatu produk..

Sedangkan dalam tugas akhir evaluasi adalah penilaian yang dilakukan dengan penelitian dari suatu objek tertentu untuk diambil kesimpulan.

2. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa, serta manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan apabila penerimaannya terhambat. Segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang-Undang (Sudirman & Amiruddin, 2012:1)

Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditujukan dan digunakan untuk pembayaran umum, dimana yang berhak memungut pajak hanyalah negara yang berupa uang. Dari definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak yang dipungut adalah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa Jasa Timbal

Dalam pengenaan pajak tidak ada ditunjukkan adanya kontrapresi secara langsung oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Pengenaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan Djayadiningrat (dalam Resmi, 2011:1) pajak sebagian dari kekayaan rakyat ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, dan dapat dipaksakan. Namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari kutipan pernyataan tersebut, pajak mempunyai tiga (3) fungsi utama yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), fungsi pemerataan (*redistribution*), dan fungsi pengatur harga (*repricing*) (Purwono, 2010:8).

- a. Fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah sebagai sumber keuangan negara, dimana pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan pajak telah dominan menyokong pembiayaan penyelenggaraann pemerintah yang meliputi pembiayaan pemerintahan, pembiayaan pembangunan, dan pembiayaan untuk keperluan legislasi dan yudikasi.

- b. Fungsi Pemerataan (*redistribution*) adalah fungsi yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat sekaligus untuk menghapus kesenjangan sosial yang sering terjadi di Indonesia. Dalam fungsi ini, pajak dikembalikan oleh rakyat dalam bentuk fasilitas publik di seluruh wilayah negara.
- c. Fungsi Pengaturan Harga (*repricing*) digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Disamping fungsi-fungsi pajak, pajak dapat digolongkan sebagai berikut:

(Sari, 43:2013)

- a. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu besarnya pajak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung, dimulai dengan menetapkan orangnya setelah itu dicari syarat-syarat objektifnya.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu besarnya pajak tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung pada subjeknya, dimulai dengan menetapkan objek wajib pajak setelah itu wajib pajak diharuskan membayar pajak yang sudah ditentukan.
- b. Menurut Pembebanannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak. Pajak langsung tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta tidak dapat dipungut secara berkala (periodik).

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut ketika ada suatu peristiwa tertentu. Pajak tidak langsung dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain, serta tidak menggunakan surat ketetapan pajak.
- c. Menurut Kewenangannya
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya dikelola oleh pemerintah daerah baik daerah propinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan pembangunan daerah (APBD).

Adapun terdapat teori pemberian justifikasi pemberian hak atas pemungutan pajak kepada negara sebagai berikut: (Mardiasmo, 2013:3)

- a. Teori Asuransi, yaitu negara sebagai pelindung keselamat jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh sebab itu rakyat harus membayar pajak yang dimisalkan sebagai suatu *premi asuransi* untuk memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan. Negara membebankan pajak kepada rakyatnya atas dasar kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan orang tersebut, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
- c. Teori Daya Pikul, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan setiap masing-masing orang. Untuk mengukur besarnya kemampuan atau

daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008:2):

a. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutan adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa negara memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran biaya produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang yang baru.

3. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara objektif maupun subjektif maka dapat disebut wajib pajak. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN atau badan usaha milik daerah.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak penghasilan meliputi PPh terutang pasal 21, PPh terutang pasal 22, PPh terutang pasal 23, PPh terutang pasal 24, PPh terutang pasal 25/29, PPh terutang pasal 26, PPh terutang pasal 15, dan PPh terutang pasal 4 ayat 2 (Muljono, 2010:11).

Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan pengenaan pajak penghasilan.

Dalam pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa warisan ditentukan, apabila seseorang yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) telah meninggal dan meninggalkan warisan yang belum terbagi maka warisan tersebut termasuk dalam subjek pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dengan demikian, ahli waris wajib pajak yang telah meninggal tersebut wajib melaporkan

penghasilan dan pajak penghasilan yang terkait dalam surat pemberitahuan (SPT) Tahunan orang pribadi (Resmi, 2011:84).

Pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak yang tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Pajak penghasilan final merupakan pungutan pajak penghasilan yang tidak perlu dikreditkan pada pajak penghasilan tahunan. Karena itu penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak melainkan hanya dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) yang bersangkutan (Sudirman & Amirrudin. 2012:219).

Berdasarkan Undang-Undang pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan final terdiri atas: (Mardiasmo, 2013:285)

- a. Penghasilan berupa bunga, sewa dan imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi.
- b. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia (BI).
- c. Penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek.
- d. Penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Surat Keterangan Bebas (SKB)

Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final (berakhir), yang diterbitkan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Surat

Keterangan Bebas (SKB) diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak yang terdaftar.

Berikut adalah Surat Keterangan Bebas memiliki beberapa jenis yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak (Awwaliatul, 2017):

a. PPh Final atas penghasilan yang memiliki peredaran tertentu

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tahun 46 tahun 2013 tentang pemotongan pajak 1% per bulan terhadap peredaran bruto, mengakibatkan tidak adanya pengkreditan pajak penghasilan yang tercantum dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan, baik untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Namun, ketika wajib pajak melakukan kegiatan yang termasuk dalam objek pajak, wajib pajak mendapatkan pemotongan untuk PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Hal ini membuat wajib pajak mendapatkan kerugian karena tarif pajak bertambah yang bersifat tidak final dan pajak yang seharusnya dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan. Atas hal ini, Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dikenai PPh final dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk mendapatkan pembebasan dan/atau pemotongan PPh yang tidak bersifat final. Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 tahun 2013 (PER-32/PJ/2013).

b. PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 32 tahun 2013 (PER-32/PJ/2013), wajib pajak yang dapat mengajukan surat keterangan bebas (SKB) atas penghasilan

bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah dana pensiun.

c. Wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal

Wajib pajak yang mengalami kerugian pada akhir tahun berjalan menyebabkan leih bayar pada pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Maka dari itu, wajib pajak yang mengalami kasus ini dapat mengajukan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan untuk dibebaskan dalam pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor PER-01/PJ/2011 dengan petunjuk pelaksanaan diautur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-11/PJ/2011.

d. PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna untuk pembangunan umum dan dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mempunyai penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau tidak termasuk subjek pajak maka dibebaskan perpajakannya tanpa pengajuan SKB. Namun untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam subjek pajak dapat dibebaskan perpajakannya dengan mengajukan surat keterangan bebas (SKB). Hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009.

e. Pajak pertambahan nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Lainnya.

Impor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional lainnya dapat dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM dengan mengajukan SKB melalui KPP Badan dan Orang Asing (KPP Badora). Peraturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2013 tentang pajak pertambahan nilai.

f. PPNBM atas kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau menerima distribusi kendaraan bermotor dibebaskan dari pengenaan PPNBM dengan mengajukan SKB melalui KPP tempat pemohon terdaftar sebelum melakukan impor atau menerima distribusi kendaraan bermotor.

g. Barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan PPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, PPN yang terutang atas impor atau penyerahan BKP atau JKP tertentu dapat dibebaskan setelah mengajukan SKB PPN.

5. Pengertian Waris

Dalam isitilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, waris adalah persoalan tentang hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Achsanudtaqwin, 2015).

Di dalam hukum Islam, waris telah diatur dan ditata secara tuntas dengan hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Proses peralihan itu dikenal dengan ilmu *faraid*, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan ahli waris. Ketentuan itu dibedakan dalam dua hal, yaitu: sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian warisan dan sebagai peraturan-peraturan perhitungannya. Dalam hukum Islam, warisan juga memiliki beberapa unsur yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan (Alamsyah, 2016).

Waris atau warisan termasuk dalam objek pajak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 (a) Undang-Undang BPHTB. Sebelumnya warisan dapat disebut subjek pajak pengganti apabila warisan tersebut belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2000 pasal 2 ayat 1 (a) Nomor 2 tentang pajak penghasilan. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar upaya pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap warisan dapat berjalan (Murdiatmo, 2007).

6. Dasar Hukum Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan karena Waris

Dasar-dasar hukum penerbitan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. (diubah beberapa kali dengan kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008).
- d. Pasal 2 ayat 1 huruf (e) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 tentang pemberian Surat Keterangan Bebas atas PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:

- a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah tidak kena pajak (PTKP) dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60.000.000- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah..
- b. Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

- c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada sehubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan